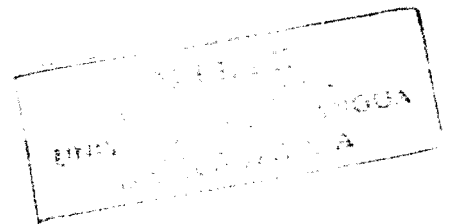


**PERUBAHAN KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP
TIMOR TIMUR DARI PRO INTEGRASI
KE PRO KEMERDEKAAN**

KIK
Fis-HI 14/00
Her
P

SKRIPSI



OLEH :

LUSI HERLIANTI

NIM : 079514834

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Semester Gasal Tahun 1999 / 2000

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP
TIMOR TIMUR DARI PRO INTEGRASI
KE PRO KEMERDEKAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas–Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

OLEH :

LUSI HERLIANTI

NIM : 079514834

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Gasal Tahun 1999 / 2000

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk diujikan di depan panitia penguji

Mengetahui

Dosen Pembimbing,



Drs. V.M.A. Dugis, M.A.

NIP. 131.929.862

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Komisi Penguji pada tanggal 2 Februari 2000

Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua :



Dra. B.L.S. Wahyu Wardhani, M.A.

NIP : 131801697

Anggota :



Drs. V.M.A. Dugis, M.A.

NIP : 131929862



Drs. Ajar Triharso, M.S.

NIP : 131289504

ABSTRAK

Pengakuan Australia baik secara *de facto* maupun secara *de jure* atas integrasi Timor Timur ke Indonesia selama ini, ternyata berakhir pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Pada masa ini pemerintah Australia menganggap bahwa suatu *act of self determination* belum dilakukan di Timor Timur sehingga pemerintah Indonesia ditekan untuk segera melakukan suatu referendum untuk menentukan keinginan masa depan rakyat Timor Timur. Akibatnya, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Australia yang terjalin selama ini memburuk dan ketegangan antara kedua negara semakin memuncak.

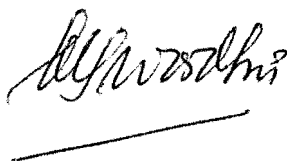
Dari kenyataan seperti itu, maka penelitian ini disusun untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung perubahan kebijakan pemerintah Australia tersebut dengan menggunakan peringkat analisa sistemik dan negara – bangsa serta menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri (yang meliputi konsep-konsep kepentingan Nasional, Kekuatan Nasional, Perubahan Sistem Internasional) dan Teori Image.

Dari analisa yang dilakukan, diperoleh suatu simpulan bahwa perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Timor Timur merupakan reaksi pemerintah Australia terhadap situasi dalam negeri Indonesia yang secara umum didukung pula oleh kepentingan nasional, kekuatan nasional, perubahan lingkungan internasional Australia serta faktor-faktor domestik yang meliputi peran-peran opini publik, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Australia. Dari analisa yang dilakukan dapat pula diketahui bahwa secara khusus kepentingan ekonomi dan hankam dinilai tidak mendukung secara langsung perubahan kebijakan pemerintah Australia tersebut, serta dinilai masih perlu pengujian lebih lanjut dengan lebih menelaah perkembangan yang ada setelah September 1999.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
Surabaya, 20 Januari 1999

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. BLS Wahyu Wardani', is written above a horizontal line.

Dra. BLS Wahyu Wardani, MA.

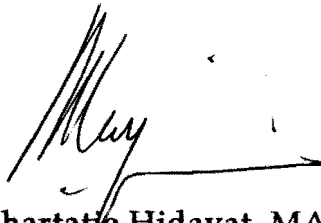
NIP. 131 801 409

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada tanggal 3 Februari 2000, pukul. 09.10 WIB

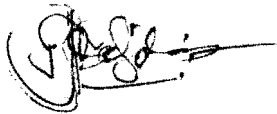
Panitia Penguji terdiri dari

Ketua :



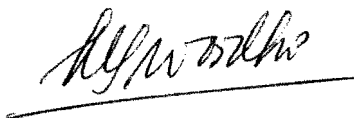
Dra. Suhartatie Hidayat, MA
NIP. 130 531 812

Anggota I :



Drs. T. Soedjadino, MA
NIP. 130 368 697

Anggota II :



Dra. BLS Wahyu Wardani, MA
NIP. 131 801 409

ABSTRAK

Aktivitas-aktivitas manusia telah mengubah kondisi lingkungan hidup global, dan perubahan-perubahan tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam : penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan-hutan tropis, endapan asam ataupun meningkatnya konsentrasi gas-gas di atmosfer yang menjebak panas dan dapat meningkatkan iklim global. Perubahan lingkungan semacam itu dapat terjadi akibat dari ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia yang sedang berkembang, dan lingkungan cenderung diperlakukan sebagai wadah bagi limbah yang dihasilkan dari penggunaan energi serta barang-barang lainnya.

Keanekaragaman bentuk perubahan lingkungan global tidak lagi menjadi kajian ilmiah semata, melainkan sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia lainnya seperti ekonomi-sosial dan bahkan politik. Secara ekonomi-sosial, perubahan lingkungan hidup global dapat mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dapat diambil contoh ketika terjadi perubahan iklim global dapat mengacaukan sistem pertanian global sehingga dapat menimbulkan bahaya kelaparan. Secara politik, alternatif-alternatif kebijaksanaan yang ditujukan bagi masalah-masalah lingkungan hidup telah memperjelas kebutuhan akan koordinasi kebijaksanaan internasional melalui kerja sama antar negara guna mendukung institusi, rejim ataupun hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kerja sama internasional mutlak diperlukan karena dalam perkembangannya tidak ada satu negara pun yang bisa terbebas dari masalah lingkungan hidup karena adanya interdependensi ekologi global. Masalah lingkungan hidup merupakan agenda global dan problem universal yang menuntut tanggung jawab bersama dari semua pihak, dengan mengingat bahwa dampak kerusakan lingkungan hidup sudah bersifat lintas-negara dan sangat kompleks seperti "lingkaran setan" .

Dengan melihat sistem internasional dewasa ini yang bersifat anarki, negara (*state actors*) masih merupakan aktor yang penting di dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup global. Selain sebagai subyek hukum internasional, negara juga merupakan pemegang kewenangan politik nasional yang tertinggi. Segala hak-hak istimewa yang dimiliki oleh negara harus diarahkan bagi terciptanya kerja sama internasional guna menuju suatu tatanan untuk lingkungan hidup global.

Kata Kunci : Negara, *Ecological Interdependence*, Kerja Sama, Kewenangan Politik, Rejim Internasional.